



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang kondusif sehingga terwujudnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah perlu dilakukan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal perlu ada petunjuk teknis operasional sebagai acuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4

Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 10 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 14 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

2016 Nomor 1 Seri D);

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
9. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Petunjuk Teknis SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Petunjuk Teknis SOP Satpol PP untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional berpedoman pada Petunjuk Teknis SOP Satpol PP.

Pasal 5

- (1) Petunjuk Teknis SOP Satpol PP meliputi :
 - a. SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. SOP Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - d. SOP Pelaksanaan Pengawasan Pejabat dan Orang-orang Penting;
 - e. SOP Pelaksanaan Pengamanan Tempat-tempat Penting; dan
 - f. SOP Pelaksanaan Operasional Patroli.
- (2) Petunjuk Teknis SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan SOP Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Mei 2017
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
BANYUMAS
NOMOR : 43 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

- I. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
1. Ruang Lingkup :
 - a. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum;
 - b. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah;
 - c. Preventif non yustisial; dan
 - d. Penindakan yustisial.
 2. Ketentuan Umum :
 - a. Mempunyai landasan hukum;
 - b. Tidak melanggar hukum;
 - c. Dilaksanakan sesuai prosedur;
 - d. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun; dan
 - e. Sumber data perizinan diperoleh secara online dari OPD yang berwenang memberikan izin.
 3. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah.
 4. Pembinaan dan Sosialisasi :
 - a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah;
 - b. Pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah; dan
 - c. Pembinaan kelompok dilakukan cara mengundang/mengumpulkan masyarakat dan badan

hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah.

5. Penindakan Preventif non Yustisial.

Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP

- a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, terlebihdahulu yang bersangkutan diminta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
- b. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan, maka akan diberikan :
 - 1) Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - 2) Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - 3) Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
- c. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tersebut, dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penindakan Yustisial

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS

- a. Penyelidikan
 - 1) Pada prinsipnya, PPNS berdasarkan Pasal 255 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa Undang-Undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan;
 - 2) Dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah, PPNS dapat menggunakan kewenangan pengawasan untuk menemukan pelanggaran pidana; dan
 - 3) Dalam hal tertentu, PPNS dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.

- b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah :
- 1) Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah. Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari :
 - a) Laporan yang diberikan oleh :
 - Setiap orang; dan/atau
 - Petugas;
 - b) Tertangkap tangan oleh masyarakat; dan/atau
 - c) Diketahui langsung oleh PPNS atau anggota Satpol PP.
 - 2) Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS atau anggota Satpol PP, dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.
 - 3) Dalam hal tertangkap tangan :

Setiap anggota Satpol PP dan PPNS dapat melaksanakan :

 - a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - b) Tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan; dan
 - c) Segera melakukan proses penyidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah.
- c. Pemeriksaan
- 1) Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik; dan
 - 2) Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang

dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut, kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

d. Pemanggilan

- 1) Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan kewenangan yang ditetapkan;
- 2) Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP;
- 3) Dalam hal Kepala Satpol PP adalah PPNS, maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Kepala Satpol PP;
- 4) Dalam hal Kepala Satpol PP bukan PPNS, maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja dengan diketahui oleh Kepala Satpol PP; dan
- 5) Surat panggilan disampaikan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP).

e. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah dibentuk Tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP dan pengampu Peraturan Daerah dengan dibantu oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, untuk melakukan :

- 1) Sidang di tempat terhadap para pelanggar Peraturan Daerah;
- 2) Pemberkasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan; dan
- 3) Koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian guna penjadwalan pelaksanaan persidangan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah di kantor Satpol PP.
- 4) Penertiban/pembongkaran atas bangunan atau reklame yang tidak berizin atau habis masa berlaku izinnya atau membahayakan keselamatan masyarakat.

II. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

1. Ruang Lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satpol PP meliputi :
 - a. Tertib tata ruang;
 - b. Tertib jalan;
 - c. Tertib angkutan jalan;
 - d. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
 - f. Tertib lingkungan;
 - g. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. Tertib bangunan;
 - i. Tertib sosial;
 - j. Tertib kesehatan;
 - k. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l. Tertib peran serta masyarakat; dan
 - m. Ketentuan lain sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pelaksanaan :
 - a. Umum Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas Pembina dalam operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah :
 - 1) Harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - 2) Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau dapat juga dengan Bahasa Daerah;
 - 3) Menguasai teknik penyampaian informasi dan presentasi yang baik;
 - 4) Berwibawa, penuh percaya diri dan bertanggung jawab;
 - 5) Harus dapat menarik simpati masyarakat;
 - 6) Bersedia menerima saran dan kritik dari masyarakat serta, mampu mengidentifikasi masalah dan

memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokok;

7) Petugas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat harus memiliki sifat :

- a) Ulet dan tahan uji;
- b) Dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama yang menyangkut tugas pokok;
- c) Mampu membaca situasi;
- d) Memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya; dan
- e) Ramah, sopan, santun, dan menghargai pendapat orang lain.

b. Khusus Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah :

- 1) Pengetahuan tentang tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya;
- 2) Pengetahuan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengetahui dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja;
- 4) Memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah; dan
- 5) Mengetahui dan memahami dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.

3. Perlengkapan dan Peralatan :

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Kartu Tanda Anggota resmi;
- c. Kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- d. Kendaraan Operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya;
- e. Kendaraan operasional yang terdiri dari kendaraan roda empat atau lebih dan roda dua sesuai standar Satpol PP;

- f. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - g. Alat pelindung diri seperti topi lapangan, helm, dan tameng;
dan
 - h. Alat perlengkapan lainnya yang mendukung kelancaran pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Tahap, Bentuk dan Cara Pelaksanaan Pembinaan :

Bentuk pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berupa materi peraturan perundang-undangan yang tidak/kurang ditaati masyarakat, terutama Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam pembinaan harus memenuhi :

- a. Penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, kelompok atau Badan Usaha;
- b. Penetapan waktu pelaksanaan pembinaan seperti bulanan, triwulanan, semesteran dan/atau tahunan. Perencanaan dengan batas waktu tersebut dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan;
- c. Penetapan materi pembinaan dilakukan agar maksud dan tujuan pembinaan dapat tercapai secara terarah, sesuai dengan subjek, objek, dan sasaran; dan
- d. Penetapan tempat pembinaan dapat bersifat formal atau informal disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Formal
 - 1) Sasaran Perorangan
 - a) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan tentang arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - b) Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang telah melanggar Peraturan Daerah atau

Peraturan Bupati untuk diberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukan mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2) Sasaran Kelompok

Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan instansi terkait, serta menghadirkan masyarakat di suatu tempat yang ditetapkan sebagai sasaran dan Narasumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Informal

Seluruh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada masyarakat.

Metode pembinaan yang dilakukan adalah dengan cara saling asah, asih dan asuh antara aparat penertiban dengan masyarakat dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Selain itu, pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga dapat dilakukan melalui :

- 1) Media massa dan media elektronik seperti surat kabar, radio dan televisi;
- 2) Pembinaan pada tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- 3) Tatap muka; dan
- 4) Pembinaan oleh Tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat dalam rangka memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

5. Teknis Persiapan Operasional Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat :

- a. Memberikan teguran pertama kepada orang atau badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. Memberikan teguran kedua apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama belum diindahkan;
 - c. Memberikan teguran ketiga apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua belum diindahkan;
 - d. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang atau badan hukum tersebut menertibkan sendiri apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran ketiga belum juga diindahkan;
 - e. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari;
 - f. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) hari; dan
 - g. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan, maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.
6. Teknis Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam menjalankan tugas :
- a. Melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini;
 - b. Melakukan pemetaan terhadap obyek atau lokasi sasaran;
 - c. Pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi;
 - d. Apabila pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya, perlu segera mengadakan koordinasi;
 - e. Sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan operasi memberikan pengarahan kepada para anggota tentang maksud dan tujuan operasi termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi;
 - f. Mempersiapkan segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa; dan
 - g. Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan penyidikan, penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial.

7. Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka:
 - a. Seorang Anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya dengan cara:
 - 1) Mendengarkan keluhan masyarakat dengan seksama.
 - 2) Tidak memotong pembicaraan orang.
 - 3) Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya.
 - 4) Jangan langsung menyalahkan ide /pendapat /keluhan /perbuatan masyarakat.
 - 5) Jadilah pembicara yang baik.
 - b. Setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus dilakukan adalah:
 - 1) Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.
 - 2) Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada si pelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan

penyuluhan.

- 3) Berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau produk hukum lainnya.
- 4) Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

8. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja.

- a. Dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait antara lain:
 - 1) Alat Negara.
 - 2) Instansi terkait.
 - 3) PPNS.
 - 4) Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- b. Teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja:
 - 1) Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yg mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - 2) Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan cara yang sopan.
 - 3) Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat .
 - 4) Apabila orang/badan hukum melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diberikan

teguran dan surat peringatan.

c. Standar Operasional Prosedur penertiban secara paksa, Pra Operasi Penertiban:

- 1) Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.
- 2) Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polres, dan Kodim).
- 3) Menentukan jadwal kegiatan penertiban, jumlah pasukan, sarana prasarana pendukung, instansi yang terlibat, dan pola operasi penertiban;
- 4) Pimpinan pasukan memberikan arahan kepada anggota pasukan yang akan melakukan penertiban agar :
 - a) bertindak tegas;
 - b) tidak bersikap arogan;
 - c) tidak melakukan pemukulan/kekerasan;
 - d) menjunjung tinggi HAM;
 - e) mematuhi perintah pimpinan;
 - f) mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa kendaraan, pakaian seragam dan pelindungnya, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), dan mobil ambulan; dan
 - g) mempersiapkan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila terjadi upaya penolakan dari masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.

d. Melakukan operasi penertiban :

- 1) membacakan/menyampaikan Surat perintah penertiban;
- 2) melakukan penutupan/penyegelan;
- 3) apabila ada penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan;
 - b) dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) untuk menjembatani;
 - c) apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan penertiban secara paksa; dan
 - d) apabila penolakan perlawanan bersifat anarkis, maka segera melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah pimpinan lebih lanjut, mengamankan pihak yang memprovokasi, melakukan tindakan bela diri untuk mencegah jatuhnya korban kedua belah pihak, melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban, melakukan advokasi dan bantuan hukum, serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut.
- e. Pembinaan
- 1) Pembinaan Tertib Pemerintahan :
 - a) melaksanakan piket secara bergiliran;
 - b) memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengamanan kantor;
 - c) memberikan/memfasilitasi bimbingan dan pengawasan serta membentuk pelaksanaan Siskamling bagi Desa dan Kelurahan;
 - d) memberikan bimbingan dan pengawasan ketertiban wilayah;
 - e) melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan;
 - f) memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara massal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g) mencegah timbulnya kriminalitas;
 - h) mengadakan pemeriksaan dan penertiban

- terhadap bangunan dan tempat usaha tanpa izin;
- i) menyelesaikan sengketa dalam masyarakat; dan
 - j) melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral lainnya yang diperlukan;
- 2) Pembinaan Tertib Lingkungan :
- a) memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelestarian lingkungan;
 - b) memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai pengendalian dan penanggulangan sampah, kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar;
 - c) memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang mengandalkan lingkungan untuk menghasilkan barang produksi; dan
 - d) melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam;
- 3) Pembinaan Tertib Sosial :
- a) preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis dan pekerja seks komersial (PSK);
 - b) refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis dan PSK baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan PSK;
 - c) rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan, pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung halaman untuk mengembalikan peran mereka, sebagai warga masyarakat;
 - d) mengadakan penertiban agar aktifitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih dan tertib;

- e) memonitor, dan memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung, toko, dan rumah makan yang melakukan kegiatannya tanpa dilengkapi dengan izin usaha;
 - f) melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dan aparat keamanan serta ketertiban kawasan parkir;
 - g) melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya; dan
 - h) Melakukan pembinaan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- f. Administrasi
- 1) Persiapan
 - a) penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan pembinaan;
 - b) penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan;
 - c) mengadakan survey lapangan;
 - d) mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
 - e) penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir, surat perintah, surat teguran dan surat panggilan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - f) pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas melakukan pembinaan;
 - 2) Pelaksanaan
 - a) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan pembinaan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi, peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa;
 - b) Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berhubungan

dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait;

- c) bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan :
 - melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - koordinasi pelaksanaan; dan
 - penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan;
 - d) Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditandatangani penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada sipenerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
 - e) pembinaan yang dilakukan secara tatap muka atau wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan
 - f) Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen;
- 3) Evaluasi
- a) setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik yang dilakukan secara rutin, insidental maupun operasi gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satpol PP dan dari Kepala Satpol PP meneruskan kepada Bupati;
 - b) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan menjelaskan tentang hambatan yang ada kepada Kepala Satpol PP dan atau yang memerintahkannya; dan

- c) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasinya.

III. PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

1. Ruang Lingkup

- a. Unjuk rasa dalam keadaan damai :

Unjuk rasa dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, ataupun mimbar bebas. Unjuk rasa umumnya telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian.

- b. Kerusuhan massa :

- 1) massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda antara lain :

- a) merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah;
- b) melakukan pembakaran benda-benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas; dan
- c) melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat lain;

- 2) Massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang melawan perintah petugas/aparat pengamanan antara lain :

- a) melewati garis batas yang telah diberikan petugas; dan
- b) melakukan tindakan kekerasan/anarkhis kepada petugas pengamanan.

2. Pelaksanaan

- a. Penanganan unjuk rasa dalam keadaan damai :

- 1) Persiapan

- a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- b) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :
 - perlengkapan perorangan : helm, pentungan, borgol, tameng dan dapat dilengkapi dengan senjata api (sesuai peraturan yang berlaku) bagi yang mempunyai izin;
 - kendaraan khusus dilengkapi dengan

- perlengkapan yang diperlukan;
- c) menyiapkan daftar tim yang bertugas dan Surat Perintah pengamanan;
 - d) komandan operasi memberikan arahan singkat perihal :
 - lokasi;
 - rute yang ditempuh;
 - situasi yang mungkin dihadapi;
 - tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan;
- 2) Pelaksanaan
- a) Koordinasi :

Kepala satpol pp melaporkan/memberitahukan kepada Bupati dan Komandan operasi melakukan koordinasi dengan aparat pengamanan lainnya dilapangan seperti dengan pihak Kepolisian atau aparat lainnya tentang :

 - jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
 - rute yang akan dilalui;
 - kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjung rasa;
 - waktu yang disediakan; dan
 - lokasi unjuk rasa;
 - b) Isolasi :
 - anggota operasi Satpol PP bersama pihak Kepolisian untuk memisahkan pengunjung rasa dengan massa penonton;
 - tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara kekerasan; dan
 - anggota Satpol PP tetap dalam formasi yang telah ditetapkan;
- 3) Laporan Hasil Kegiatan
- a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera;

- b. Penanganan kerusuhan massa
 - 1) Persiapan :
 - a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - b) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - Perlengkapan Perorangan : helm, pentungan, borgol, tameng (senjata api bagi yang mempunyai izin);
 - Kendaraan Khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.
 - c) menyusun daftar petugas dan Surat Perintah pengamanan;
 - d) komandan operasi memberikan arahan singkat perihal tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan;
 - 2) Pelaksanaan :
 - a) komandan Operasi melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian tentang langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan;
 - b) anggota Satpol PP yang sifatnya sebagai tenaga pendukung (bantuan) hanya melakukan tindakan sesuai koordinasi pihak Kepolisian; dan
 - c) tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan;
 - 3) Laporan Hasil Kegiatan :
 - a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera;

IV. PENGAWALAN PEJABAT DAN ORANG-ORANG PENTING

1. Ruang Lingkup

Pengawasan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan dengan cara :

- a. pengawasan dengan sepeda motor; dan
- b. pengawasan dengan kendaraan mobil;

2. Pelaksanaan

a. Pengawalan dengan sepeda motor :

1) Persiapan

- a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- b) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :
 - perlengkapan perorangan : helm, pentungan, borgol dan dapat diperlengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin);
 - kendaraan khusus yang dilengkapi peralatan yang dibutuhkan;
 - Pengemudi diutamakan memiliki kompetensi pendidikan pengemudi (memiliki SIM); dan
- c) menyusun jadwal, daftar petugas dan Surat Perintah Pengawalan;

2) Pelaksanaan

- a) dua sepeda motor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar, dan pengawal berdiri disamping sepeda motor;
- b) pejabat/tamu VIP sudah berada di dalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;
- c) komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;
- d) sepeda motor berjajar dengan sepeda motor lainnya berangkat menuju tujuan;
- e) selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
- f) tiba di tujuan :
 - sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan;
 - berhenti dan parkir ditempat yang aman;
- g) selesai acara:
 - sepeda motor telah siap;
 - Komandan Operasi, laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan;

- h) tiba di kantor :
Setelah sepeda motor di parkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.
- 3) Laporan Hasil Kegiatan
 - a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera;
- b. Pengawalan dengan kendaraan mobil :
 - 1) Persiapan
 - a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - b) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :
 - perlengkapan perorangan : helm, pentungan, borgol dan dapat diperlengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin);
 - kendaraan khusus yang dilengkapi peralatan yang dibutuhkan;
 - Pengemudi diutamakan memiliki kompetensi pendidikan pengemudi (memiliki SIM); dan
 - c) menyusun jadwal, daftar petugas dan Surat Perintah Pengawalan;
 - 2) Pelaksanaan
 - a) pengemudi lapor kepada Komandan Operasi tentang kesiapan kendaraan;
 - b) Komandan Operasi menyiapkan regunya paling banyak 6 (enam) orang untuk naik ke kendaraan dan siap melakukan pengawalan;
 - c) Komandan Operasi menuju ke ajudan dan melaporkan kesiapannya untuk melakukan pengawalan;
 - d) Komandan Operasi naik ke kendaraan duduk bersebelahan dengan pengemudi, dan memerintahkan pengemudi untuk menjalankan kendaraan;
 - e) selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;

- f) tiba di tujuan :
 - sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan;
 - anggota Operasi turun dan menyebar melakukan pengawalan;
- g) selesai acara:
 - kendaraan dan anggota operasi telah siap;
 - Komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan;
- h) tiba di kantor
Setelah kendaraan berhenti, seluruh anggota operasi turun, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.

3) Laporan Hasil Kegiatan

- a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;
- b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera;

V. PENGAMANAN TEMPAT-TEMPAT PENTING

1. Ruang Lingkup

Penjagaan tempat-tempat penting yang perlu dilakukan oleh Satpol PP antara lain :

- a. Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah :
 - 1) Persiapan
 - a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - b) melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait;
 - 2) Pelaksanaan
 - a) Merencanakan penyusunan jadwal dan petugas yang akan melakukan tugas di rumah dinas;
 - b) membuat Berita Acara pelimpahan tugas dengan petugas jaga pengganti yang ditandatangani oleh yang melimpahkan dan yang menerima pelimpahan tugas;

- c) mencatat dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung;
 - d) melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar pintu gerbang pada saat pejabat/tamu keluar masuk lingkungan rumah dinas;
 - e) mencatat identitas, logat bicara/dialek, suara-suara lain yang terdengar, serta pesan yang disampaikan oleh penelpon;
 - f) mencatat kejadian-kejadian penting/menonjol selama melakukan tugas jaga;
 - g) melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap petugas pelayanan seperti petugas telpon, PAM, listrik dan lainnya;
 - h) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif disetiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian; dan
 - i) menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau sejenisnya serta para pencari sumbangan (perorangan, yayasan dan lain-lain);
- 3) Laporan Hasil Kegiatan
- a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera;
- b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- 1) Persiapan
 - a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - b) melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait;
 - 2) Pelaksanaan
 - a) melakukan Pemeriksaan di lingkungan Ruang Kerja Pejabat sebelum yang bersangkutan tiba;
 - b) melakukan koordinasi dengan Tata Usaha dan Ajudan:
 - c) melakukan pencatatan jadwal kegiatan Pejabat

pada hari yang bersangkutan dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dalam waktu 1 (satu) minggu yang akan datang;

- d) memberikan pelayanan penunjang lainnya kepada Pejabat tersebut bilamana diperlukan;
 - e) mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung;
 - f) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian;
 - g) menjaga dan menertibkan para pedagang, penjaja barang atau sejenisnya dan para pencari sumbangan (perorangan, yayasan dan lain-lain);
 - h) mengingatkan kepada Tata Usaha untuk melakukan pengecekan kembali terhadap instalasi listrik, air, pemadam kebakaran, AC, tempat penyimpanan dokumen/arsip dan lain-lain, setelah Pejabat yang bersangkutan meninggalkan tempat;
 - i) melaksanakan penjagaan sesuai dengan jam kerja kantor atau sampai dengan batas waktu pejabat meninggalkan tempat;
- 3) Laporan Hasil Kegiatan
- a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera;
- c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat
- 1) Persiapan
 - a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - b) melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait;
 - 2) Pelaksanaan
 - a) melakukan Pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;

- b) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - c) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
 - d) mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - e) melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, bila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa bom, bahan peledak dan jangan sekali-kali dipegang/disentuh serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang dicurigai tersebut;
 - f) mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada di lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - g) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan;
 - h) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu/undangan yang akan diundang;
 - i) melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya;
 - j) saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan dilapangan;
- 3) Laporan Hasil Kegiatan
- a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera;

- d. Tempat Kedatangan dan Tempat Tujuan Tamu/Delegasi VIP.
- 1) Persiapan
 - a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - b) melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait;
 - 2) Pelaksanaan
 - a) melakukan penjagaan di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan Tamu/ Delegasi;
 - b) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda benda di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan, sebelum para tamu/delegasi tiba dilokasi;
 - c) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasidan kondisi di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan;
 - d) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian;
 - e) mengawasi dan mencermati kejadian yang penting/menonjoldi tempat kedatangan dan tempat tujuan;
 - f) melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, bila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa bom, bahan peledak dan jangan sekali-kali dipegang/disentuh serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang dicurigai;
 - g) mengawasi dan mengenali setiap tamu undangan dan orang-orang yang berada dilingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan;
 - h) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan;
 - i) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab

- melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu/undangan yang akan diundang;
- j) melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya;
 - k) saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan dilapangan;
- 3) Laporan Hasil Kegiatan
- a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera;
- e. Penjagaan Gedung dan Aset Penting
- 1) Persiapan
 - a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - b) melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait;
 - 2) Pelaksanaan
 - a) menyusun rencana jadwal pengawasan serta jenis gedung/aset beserta lokasinya;
 - b) merencanakan dan menyiapkan petugas jaga;
 - c) melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola Gedung/Aset;
 - d) melakukan pendataan bukti kepemilikan Gedung/Aset, gambar situasi/denah, dan proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
 - e) melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga Dinas, Instansi, pengelola gedung/aset; dan
 - f) merencanakan dan menyiapkan sarana dan fasilitas perlengkapan yang digunakan untuk memonitor gedung/aset;
 - 3) Laporan Hasil Kegiatan
 - a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian

yang memerlukan tindakan segera;

f. Upacara dan Acara Penting

1) Persiapan

- a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- b) melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait;

2) Pelaksanaan

- a) merencanakan dan menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara dan acara penting;
- b) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
- c) melakukan koordinasi pengaturan lalu lintas disekitar lokasi;
- d) mengarahkan pengemudi kendaraan bermotor peserta upacara menuju tempat parkir yang disediakan;
- e) melakukan penertiban terhadap para pedagang penjaja barang atau sejenisnya dilokasi;
- f) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
- g) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
- h) mengawasi dan mencermati kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi;
- i) melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, bila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa bom, bahan peledak dan jangan sekali-kali dipegang/disentuh serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang dicurigai;
- j) mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi;

- k) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud;
 - l) melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada;
 - m) saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan dilapangan;
- 3) Laporan Hasil Kegiatan
- a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera;

VI. PELAKSANAAN OPERASIONAL PATROLI

1. Ruang Lingkup

- a. tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. antar batas wilayah; dan
- c. tempat keramaian/hiburan;

2. Ketentuan dalam pelaksanaan

a. Umum :

Beberapa persyaratan penting yang harus dimiliki oleh setiap petugas patroli :

- 1) setiap petugas harus memiliki kewibawan yang tercermin dalam jiwa pengabdian yang penuh etika dengan rasa tanggung jawab;
- 2) dalam melaksanakan tugas harus dapat menarik rasa simpati masyarakat;
- 3) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa mengenyampingkan tugas pokok yang dilaksanakan;
- 4) setiap petugas harus memahami tugas pokoknya, peka terhadap situasi lingkungan dan arif dalam menangani suatu peristiwa serta melaporkannya dengan benar;
- 5) petugas patroli harus memiliki sifat tertentu antara lain:

- a) ulet dan tahan uji;
 - b) memiliki sifat ingin tahu;
 - c) memiliki pengetahuan tentang tugasnya dan diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dari masyarakat;
 - d) menyadari bahwa tugas adalah dari pemerintah;
 - e) mampu memahami serta menampung apa yang merupakan keinginan/ aspirasi masyarakat;
 - f) ramah, sopan dan santun serta menghargai setiap orang;
- 6) perlunya dibuat pos Satpol PP di tempat keramaian seperti pasar dan pertokoan;

b. Khusus :

Beberapa pengetahuan dasar yang harus dimiliki setiap petugas patroli :

- 1) pengetahuan tugas pokok Satpol PP;
- 2) pengetahuan dasar hukum dari suatu tindakan atau kegiatan;
- 3) pengetahuan dan penguasaan tentang suatu daerah/wilayah, misalnya :
 - a) letak dan wilayah tersebut;
 - b) gedung pemerintah dan instansi vital;
 - c) jalan dan gang;
 - d) jenis usaha masyarakat, pekerjaan dan keadaan ekonomi masyarakat;
 - e) pejabat pemerintah dan orang penting;
 - f) keadaan lingkungan; dan
 - g) Pengetahuan tentang sumber penyebab dari segala macam bentuk gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat antara lain:
 - segala bentuk yang terkait dengan penyakit masyarakat;
 - lokasi yang dijadikan sebagai tempat pelacuran (PSK);
 - tempat hiburan (bar, cafe, diskotik dan lain-lain); dan

- tempat usaha yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan;
- c. Petunjuk dalam patroli :
- 1) Sebelum petugas berangkat patroli wajib memeriksa semua kelengkapan sesuai ketentuan petunjuk yang diberikan pimpinan.
 - 2) Untuk patroli berjalan kaki :
 - a) Tugas patroli dimulai sejak keluar dari kantor;
 - b) dilakukan minimal 2 (dua) orang;
 - c) patroli pada siang hari di daerah pasar dan pertokoan yang dianggap rawan;
 - d) usahakan untuk mengenal daerah patroli;
 - e) dalam melaksanakan patroli, perhatian harus ditujukan kepada pelanggar peraturan perundang-undangan serta dicatat untuk dilaporkan kepada pimpinan;
 - f) dalam hal tertentu diwajibkan untuk bertindak segera, yaitu
 - dalam hal pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan);
 - terjadinya kebakaran; dan
 - bencana alam;
 - g) setiap patroli dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan kepada norma dan peraturan yang berlaku.
 - 3) Untuk patroli dengan kendaraan bermotor:
 - a) Ketentuan dan petunjuk untuk patroli berjalan kaki berlaku pula bagi patroli dengan kendaraan bermotor.
 - b) Patroli kendaraan bermotor dilakukan dengan:
 - berkendara sepeda motor;
 - berkendara mobil;
 - c) Persiapan sebelum berangkat patroli wajib memeriksa kelengkapan kendaraan sebagai berikut:
 - bensin, oli;

- ban roda;
 - perkakas kendaraan termasuk dongkrak dan kunci roda;
 - rem, air accu; dan
 - perlengkapan perorangan sesuai dengan ketentuan;
- 4) Beberapa ketentuan tentang patroli dengan kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas :
- a) Beri contoh yang baik kepada pemakai jalan yang lainnya;
 - b) Taati peraturan lalu lintas;
 - c) Jalankan kendaraan dengan kecepatan yang semestinya;
 - d) Jangan membunyikan klakson/sirine jika tidak sangat perlu sekali; dan
 - e) Jangan menggunakan sorotan lampu yang berlebihan pada malam hari;
- 5) Jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan terhadap Peraturan Daerah (seperti bangunan liar, pedagang berjualan tidak pada tempatnya, tempat usaha yang mengganggu lingkungan/ketertiban umum maupun tidak mempunyai surat izin usaha, dan lainnya yang bersifat mengganggu ketertiban umum) :
- a) ambil langkah-langkah atau tindakan pertama berupa penyuluhan, teguran dan peringatan;
 - b) catat dan laporkan pada pimpinan;
 - c) memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit masyarakat :
 - apakah ada gelandangan, pengemis jalanan yang beroperasi di jalan;
 - apakah ada pekerja seks komersial (PSK); dan
 - apakah ada tempat/orang yang menjual minuman keras secara terbuka dan lainnya
- 6) Komunikasi sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka perorangan/kelompok atau dengan massa.

Komunikasi sosial yang dilaksanakan bersifat :

- a) Penerangan, artinya memberikan penerangan agar lawan bicara mengetahui dan mengerti tentang sesuatu hal, misalnya penerangan tentang tugas pokok Satpol PP;
 - b) Penyuluhan dan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewajiban sebagai warga negara yang baik misalnya :
 - bagi pedagang kaki lima tidak dibenarkan berjualan diatas trotoar dan badan jalan;
 - setiap pengusaha harus memiliki surat izin tempat usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah;
 - setiap orang yang mendirikan bangunan harus mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - Memberikan penyuluhan tentang segala sesuatu yang menyangkut dengan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan); dan
 - memberikan penyuluhan tentang hal lain yang sifatnya untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dan menjaga ketertiban umum;
 - c) Penggalangan :

Petugas menghimbau masyarakat agar mau mentaati peraturan perundang-undangan, sadar untuk membayar pajak serta menjaga dan menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.
- 7) Petunjuk khusus tentang teknik berkomunikasi :
- a) Jadilah pembicara yang baik;
 - b) Tegurlah seseorang, atau ucapkan salam menurut adat kebiasaan yang berlaku dengan suara yang wajar, sikap yang ramah;
 - c) Mengenalkan diri secara lengkap;
 - d) Kemukakan apa yang diharapkan dari orang yang dihadapi;

- e) Beri kesempatan orang untuk berbicara;
- f) Jadilah pendengar yang bijaksana;
- g) Jangan memotong pembicaraan;
- h) Hadapi dengan singkat pembicaraan mereka; dan
- i) Tunjukkan contoh tauladan dari sikap dan perilaku yang baik

3. Bentuk dan Cara Patroli

a. Bentuk-bentuk patroli :

Tugas patroli dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :

- 1) patroli pengawasan yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 jam; dan
- 2) patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat represif;

b. Cara patroli :

Sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, sasaran yang ada serta tugas dan tujuan, maka cara-cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas patroli adalah :

- 1) Patroli berjalan kaki
Patroli ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor. Patroli berjalan kaki ini lebih memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dalam rangka sosialisasi dan pelayanan masyarakat;
- 2) Patroli bersepeda motor
Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli berjalan kaki dalam wilayah yang lebih luas; dan
- 3) Patroli kendaraan roda empat atau lebih
Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli bersepeda motor dalam wilayah yang lebih luas dan perlu tenaga operasional yang lebih banyak;

4. Perlengkapan dan/atau peralatan :
 - a. perlengkapan/peralatan perorangan terdiri dari :
 - 1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - 2) Kartu Tanda Anggota;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk;
 - 4) Pluit;
 - 5) Pentungan;
 - 6) Senter;
 - 7) Buku Saku dan Alat Tulis;
 - 8) Topi/Helm;
 - 9) Kopel Rim;
 - 10) Jaket;
 - 11) Borgol; dan
 - 12) Senjata Api (bagi yang mempunyai izin);
 - b. perlengkapan/peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari :
 - 1) Perlengkapan perorangan;
 - 2) Pentungan;
 - 3) Borgol;
 - 4) Senjata Api (bagi yang mempunyai izin);
 - c. Perlengkapan/peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari:
 - 1) Perlengkapan perorangan;
 - 2) Pentungan;
 - 3) Borgol;
 - 4) Senjata Api (bagi yang mempunyai izin);
 - 5) Sepeda Motor Dinas dengan perlengkapannya :
 - a) Surat Izin Mengemudi;
 - b) STNK; dan
 - c) Peralatan kunci;
 - d. perlengkapan/peralatan patroli kendaraan roda empat terdiri dari :
 - 1) Perlengkapan perorangan;
 - 2) Pentungan;
 - 3) Borgol;
 - 4) Senjata Api (bagi yang mempunyai izin);
 - 5) Kendaraan roda empat dinas dengan perlengkapannya:

- a) Surat Izin Mengemudi;
- b) STNK;
- c) Lampu Patrol;
- d) Lampu Sorot;
- e) Sirine;
- f) Kotak P3K;
- g) Kunci dan Dongkrak; dan
- h) Alat Pemadam Kebakaran;

5. Pelaksanaan :

a. Perencanaan Patroli

Perencanaan Tugas Patroli harus dibuat dengan memperhatikan :

- 1) keseimbangan antara cara dan sarana dengan sarannya;
- 2) terlaksananya kerjasama Satpol PP dengan masyarakat sehingga pelaksanaannya dapat mencapai dayaguna dan hasil guna;
- 3) sebab dan akibat yang timbul, yang memungkinkan Satpol PP harus bertindak sebaiknya dapat diketahui terlebih dahulu;
- 4) Perencanaan Tugas Patroli harus disesuaikan dengan tugas pokok Satpol PP dan peraturan yang berlaku;
- 5) Hal-hal mendasar lainnya yang harus diperhatikan dalam perencanaan patroli adalah sebagai berikut :
 - a) untuk setiap tugas patroli harus dibuat Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Satuan, serta dicantumkan jumlah, nama serta pangkat dan NIP personil yang akan diberangkatkan;
 - b) untuk tugas khusus diberikan ketentuan tentang tugas pokok yang harus dilakukan;
 - c) setelah kembali dari patroli, Kepala Patroli yang ditunjuk harus melapor kepada Kepala Satuan dalam waktu 24 jam dan menyerahkan laporan; dan
 - d) ketentuan perlengkapan dan alat komunikasi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah;

b. Pelaksanaan bentuk-bentuk patroli

1) Patroli

- a) patroli biasanya dilaksanakan dalam kota;
- b) penugasan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli pada buku mutasi;
- c) tugas patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, supaya dapat mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan atau dilaporkan kepada pimpinan;
- d) setiap kejadian harus dicatat di buku; dan
- e) tugas patroli dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut :
 - patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki terhadap suatu tempat yang dianggap rawan terhadap ketertiban umum;
 - patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan; dan
 - patroli kabupaten yaitu pengawasan terhadap kabupaten yang menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan yang ada diseluruh wilayah kabupaten;

2) Patroli Pengawasan :

- a) patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta upaya penegakan Peraturan Daerah yang ada;
- b) tugas dari patroli adalah :
 - pemeliharaan, pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - melaksanakan pembinaan masyarakat;
 - penerangan pada masyarakat tentang tugas dan fungsi Satpol PP; dan

- mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugas Polisi Pamong Praja serta menampung saran dan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

3) Patroli Khusus :

- a) patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan dalam upaya penegakan ketertiban umum.
- b) tugas dari patroli adalah :
 - melakukan penindakan terhadap semua pelanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Peraturan Daerah; dan
 - menindak lanjuti semua laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Peraturan Daerah;

6. Administrasi :

a. Surat Perintah Patroli

Setiap akan melaksanakan patroli harus membawa Surat Perintah Patroli yang dikeluarkan oleh Kepala Satpol PP;

b. Daftar Petugas Patroli

Dalam Surat Perintah Patroli harus dicantumkan nama-nama anggota yang ditunjuk melaksanakan patroli;

c. Laporan Hasil Tugas Patroli

Apabila telah selesai atau kembali dari tugas segera membuat laporan tugas patroli yang diserahkan kepada Kepala Satpol PP.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN